

Isu Dinasti Politik pada Pilkada Serentak 2020 di Media Daring: Analisis Isi Pemberitaan Kompas.com

Ningtyas Septiani Putri
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Helmi Hidayat
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

R. Cecep Romli
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Pemberitaan dinasti politik menjadi diskusi populer dan akademis dalam Pilkada serentak 2020 sejak majunya anggota keluarga Presiden dan Wakil Presiden dalam ajang kontestasi politik di Indonesia. Demikian halnya Kompas.com yang sangat intens memberitakan isu dinasti politik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan sekaligus memilah kategori berita yang paling dominan dan sikap Kompas.com dalam mengemas pemberitaan isu dinasti politik. Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan imbangnya jumlah paragraf berita yang mendukung pasangan calon berlatar dinasti politik dan sekaligus pemberitaan yang mengkritiknya, yakni sebanyak 300 paragraf dan 296 paragraf. Sedangkan sikap penulisan yang dominan adalah kategori netral yakni sebanyak 520 paragraf atau 38.23%. Dengan kata lain, meski pemberitaan media Kompas.com dapat disimpulkan independen, berimbang dan mengulasnya sesuai kebenaran factual secara kritis, tetapi Kompas.com tidak menolak adanya praktik dinasti politik tersebut terjadi dalam kontestasi pilkada serentak 2020.

Kata Kunci:

Agenda Media, Analisis Isi, Dinasti Politik, Pilkada Serentak 2020, Kompas.com.
Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22988>

A. Pendahuluan

Isu dinasti politik menjadi isu yang hangat diperbincangkan khususnya di media *online* setelah anggota keluarga Presiden yaitu Gibran Rakabuming dan Bobby Afif, Putri

Wakil Presiden yaitu Siti Nur Azizah, dan Keponakan Menteri Pertahanan yaitu Rahayu Saraswati maju dalam ajang kontestasi Pilkada serentak tahun 2020.¹ Berbagai isu yang berkaitan

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/10144661/691-persen-responden-mau-pilih-hasil-politik-dinasti-jika-ada->

[kemampuan?page=all](#) diakses pada 15 Januari 2021

dengan tokoh publik selalu menjadi bahan menarik untuk pemberitaan media massa. Hal ini menjadikan momentum praktik dinasti politik kembali menuai sorotan, sehingga memunculkan beragam pro dan kontra di tengah masyarakat. Istilah dinasti politik dalam pemberitaan media merujuk pada adanya calon kepala daerah yang terafiliasi dengan pejabat publik.

Munculnya pro dan kontra dari tokoh-tokoh politik terhadap sejumlah pasangan calon kepala daerah yang terafiliasi dengan pejabat publik dalam Pilkada serentak 2020 membuat media massa ramai-ramai memberitakan bagaimana perkembangan isu dinasti politik tersebut.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan bertambahnya politik dinasti di lingkungan pemerintahan daerah. Di tahun 2015 politik dinasti sudah cukup marak. Sebanyak 61 kepala daerah atau 11 persen dari total daerah yang ada.² Sedang di tahun 2020 persentase politik dinasti terus bertambah. Nagara Institute mencatat sebesar 14,78 persen atau 80 daerah dari 541 daerah di Indonesia.³ Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020 dilaksanakan di 270 daerah dengan berbagai tingkatan, di antaranya sebanyak sembilan provinsi,

224 kabupaten, serta 37 kota di seluruh Indonesia.⁴

Hasil penelitian Nagara Institute menunjukkan bahwa terdapat 124 calon pada Pilkada serentak tahun 2020 yang tergabung dalam dinasti politik dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan rincian 57 calon bupati, 30 calon wakil bupati, 20 calon walikota, delapan calon wakil walikota, lima calon gubernur dan empat calon wakil gubernur. 124 calon kepala daerah tersebut memiliki hubungan berupa anak, istri, suami, saudara atau kerabat pejabat pusat atau daerah. Jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin, ada 67 laki-laki dan 57 perempuan. Di antara 57 perempuan, 29 calon perempuan adalah istri mantan bupati.⁵

Data tersebut menampilkan bahwa ikut sertanya keluarga atau kerabat pejabat publik dalam Pilkada serentak 2020 memberi kesan akan kuatnya genggamannya dinasti dan oligarki politik.⁶ Padahal dalam demokrasi, idealnya rakyat memiliki peluang yang besar untuk turut andil dalam proses politik, untuk berpartisipasi dalam kontestasi merebutkan jabatan politik baik tingkat daerah maupun pusat.⁷ Dan media sebagai pilar keempat demokrasi

² <https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di-61-kepala-daerah-bk1D> diakses pada 15 Januari 2021

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/19261381/riset-nagara-institute-banten-terbesar-soal-terpapar-dinasti-politik> diakses pada 15 Januari 2021

⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/1713510/ketua-kpu-743-bakal-pasangan-calon-kepala-daerah-daftar-pilkada-2020> diakses tanggal 8 Januari 2021

⁵ <http://Nagarainstitute.Com/Wp-Content/Uploads/2020/10/PERS-RELEASE->

DINASTI-POLITIK-NAGARA-INSTITUTE-12-OKTOBER-2020.pdf diakses pada tanggal 14 Januari 2021

⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326377/pilkada-2020-dibidik-oligarki-demokrasi-mati-suri> diakses pada 18 Februari 2021

⁷ Martien Herna Susanti, *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, Universitas Negeri Semarang, Vol.1, No.2, (2017), h.112

seharusnya berperan untuk memberi edukasi politik sehingga publik paham akan kondisi politik dinasti.

Peneliti memilih media *online* Kompas.com karena pada isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 Kompas.com menaruh perhatian lebih. Kompas.com selalu memperbaharui berita-berita yang berkaitan dengan isu dinasti politik ini. Kompas.com membuat laporan pemberitaan isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 sebanyak 60 judul berita selama periode 4 Desember 2019 hingga 26 Desember 2020.

Kuantifikasi pemberitaan isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 di Kompas.com tergolong intens dibandingkan media *online* lainnya dalam kurun waktu yang sama, seperti Detik.com hanya menerbitkan berita sebanyak 26 judul, Republika.com sebanyak 28 judul, dan Tempo.co sebanyak 24 judul. Kompas.com juga dikenal sebagai media yang dipercaya publik, terlihat dari penghargaan yang disematkan kepada Kompas.com dalam Gala Awards Superbrands 2019 dengan kategori *Trusted Online Media* di antara 200 media *online* yang dikategorikan terverifikasi. Kompetisi ini adalah ajang pemberian penghargaan atas brand terkemuka di Indonesia berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Nielsen.⁸

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isi pemberitaan isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020. Penelitian ini

B. Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori agenda setting yang dikemukakan

bertujuan untuk mengetahui kategori isu pemberitaan mengenai isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020

yang diberi tekanan atau banyak diberitakan oleh Kompas.com. Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan desain analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Dengan menggunakan desain tersebut peneliti dapat mengetahui agenda media terkait kategori isu pemberitaan yang ditonjolkan oleh Kompas.com dalam tema pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak 2020. Selain mengetahui kategori isu pemberitaan yang ditonjolkan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keberpihakan media dengan menghitung jumlah frekuensi sikap penulisan pemberitaan yang mendukung atau *favourable*, tidak mendukung atau *unfavourable*, dan netral pada pemberitaan isu dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 di Kompas.com.

Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan: 1) kategori isu apa yang paling dominan dalam tema pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak 2020 di Kompas.com?; 2) Berapa besar frekuensi pemberitaan isu dinasti politik yang mendukung (*favourable*), tidak mendukung (*unfavourable*) dan netral pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kompas.com?

oleh McCombs dan Shaw pada tahun 1968. Teori agenda setting melihat

⁸ <https://money.kompas.com/read/2019/08/01/124215826/kompascom-kembali-jadi-pemenang-kategori-media-online->

[tepercaya?page=all](#) diakses pada 18 Februari 2021

bahwa media memiliki kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik⁹. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media menganggap isu tersebut penting.

Ide dasar dari teori agenda media adalah bahwa media memberikan perhatian yang berbeda pada setiap isu. Di antara berbagai masalah yang muncul atau sudah mengemuka, beberapa masalah (peristiwa, orang) dilaporkan cukup besar, dan ada yang dilaporkan dengan proporsi yang kecil.¹⁰ Dalam konteks ini isu yang ditonjolkan oleh media menunjukkan isu yang menjadi perhatian media.

Perhatian media atas isu tertentu dapat dilihat melalui dimensi-dimensi dalam Agenda Media, yaitu:¹¹

1. Visibilitas (*visibility*), yaitu jumlah dan tingkat penonjolan berita;
2. Tingkat menonjol bagi khalayak (*audience salience*), yaitu relevansi konten berita dan kebutuhan khalayak;
3. Valensi (*valence*), yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.

Dimensi-dimensi dalam konsep agenda media dapat langsung

diturunkan ke dalam indikator yang dapat diukur, yaitu:¹²

1. Isu-isu yang dilaporkan media; dengan melihat isu-isu apa saja yang banyak diberitakan media, maka isu tersebutlah yang ingin ditonjolkan oleh media;
2. Panjang berita di surat kabar; dengan mengukur panjang berita di halaman surat kabar;
3. Penempatan isu tersebut di halaman surat kabar.

Indikator-indikator agenda media kemudian diukur menggunakan analisis isi kuantitatif. Analisis isi bertujuan untuk menentukan peringkat berita berdasarkan panjang (waktu dan ruang), penonjolan topik yang diberitakan (ukuran headline, penempatan, frekuensi), dan konflik (metode penyajian).¹³ Atas dasar itu, diharapkan analisis penelitian ini mampu mengkaji agenda media dalam pemberitaan isu dinasti politik pada Pilkada serentak 2020 di Kompas.com.

Rahayu menyebutkan beberapa tolok ukur dasar terkait keberpihakan pemberitaan media:¹⁴

1. Perasaan dukungan (*favourable*) atau tidak mendukung

⁹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) h.224

¹⁰ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 196

¹¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) h.225

¹² Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi*

dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.197

¹³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: PT Kencana Prenada Group, 2016), h.227

¹⁴ Rahayu, *Potret Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan Surat Kabar Indonesia. Dalam Rahayu (ed). Menangkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, (Pusat Kajian Media dan Budaya Populer: Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Infomasi, 2006). h.134

(*unfavourable*); lebih spesifiknya, yaitu sikap keberpihakkan sebagai derajat sikap positif dan negatif terhadap objek berita;

2. Dalam kegiatan pemberitaan, sikap berpihak media akan tampak didasarkan pada kecenderungan positif, negatif atau netral;
3. Media harus mematuhi standar profesional dalam menjalankan perannya dalam memberikan informasi berita; yaitu menjaga sikap yang obyektif, seimbang dan akurat agar berada pada posisi yang mandiri.

C. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berita terkait dinasti politik dalam Pilkada serentak 2020 yang diberitakan oleh portal berita Kompas.com sebanyak 60 judul dari tanggal 4 Desember 2019 sampai 26 Desember 2020 dengan menggunakan judul sebagai sampel.

Setelah berita dikumpulkan, peneliti membuat kategori. Penelitian ini memerlukan instrumen utama, yaitu kategorisasi. Fungsi kategorisasi serupa dengan kuesioner dalam survei. Kategori berkaitan dengan isi konten berita yang akan dikategorikan. Kategori yang terdapat pada pemberitaan isu dinasti politik dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kompas.com adalah kategori isu pemberitaan dan kategori sikap penulisan pemberitaan.

Kategori isu pemberitaan dibuat peneliti secara sistematis disertai penjelasan, sebagai berikut:

1. Kebijakan aturan bagi kerabat pejabat dalam kontestasi Pilkada;

kategori ini difokuskan pada pemberitaan yang menyebutkan perihal apakah ada atau tidak hukum yang mengatur kerabat pejabat dalam kontestasi Pilkada di Indonesia;

2. Pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik; kategori ini ditekankan pada pemberitaan pasangan calon yang dihubungkan dengan pejabat publik dan juga terkait penyebutan jumlah pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik;
3. Kritikan terhadap dinasti politik; kategori ini ditekankan pada seluruh pemberitaan yang menyatakan tanggapan publik tidak atau kurang setuju dengan adanya pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik
4. Dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik; kategori ini ditekankan pada pernyataan publik yang menyatakan tidak adanya masalah jika kerabat pejabat mencalonkan diri, mewajarkan hal tersebut, dan mendukung pasangan calon karena melihat dari kesuksesan keluarga calon yang telah menjabat sebelumnya;
5. Penyebab adanya dinasti politik; kategori ini difokuskan pada alasan atau sebab munculnya dinasti politik yang diungkapkan oleh narasumber dalam pemberitaan isu dinasti politik;
6. Dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik; kategori ini ditekankan pada pemberitaan yang menyebutkan terkait dampak apa yang ditimbulkan atau akan terjadi jika dinasti politik tetap dilanggengkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia;

7. Kegiatan pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik; penekanan pada kategori ini terletak pada seluruh pemberitaan berisi informasi kegiatan pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik saat Pilkada 2020 berlangsung;
8. Visi dan misi pasangan calon; kategori ini mengenai pemberitaan terkait visi dan misi pasangan calon yang terafiliasi pejabat publik dalam Pilkada 2020;
9. Tanggapan pasangan calon dan keluarga atas tuduhan dinasti politik; kategori ini difokuskan pada pernyataan pasangan calon dan keluarga yang menanggapi tuduhan dinasti politik atau membantah atas tuduhan tersebut;
10. Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon kepala

daerah; penekanan pada kategori ini terletak pada seluruh pemberitaan yang berisi informasi perolehan suara calon kepala daerah dan jumlah surat suara masuk hasil rekapitulasi.

D. Temuan dan Pembahasan

Analisis Isi Berdasarkan Isu Pemberitaan

Setelah kategorisasi ditentukan, peneliti meneliti kategori isu pemberitaan dominan Kompas.com. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proporsi pemberitaan isu dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020 dengan melihat seberapa banyak kategori-kategori itu dimuat. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 1. Agenda Kompas.com terkait Dinasti Politik pada Pilkada Serentak 2020

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase	Ranking
1.	Kebijakan aturan bagi kerabat pejabat dalam kontestasi pilkada.	58	4.26%	8
2.	Pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik.	222	16.32%	3
3.	Kritikan terhadap dinasti politik.	296	21.76%	2
4.	Dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik.	300	22.05%	1
5.	Penyebab adanya dinasti politik.	17	1.25%	9
6.	Dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik.	15	1.1%	10
7.	Kegiatan pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik.	164	12.05%	4

8.	Visi dan misi pasangan calon.	68	5%	6
9.	Tanggapan pasangan calon dan keluarga atas tudingan dinasti politik.	159	11.69%	5
10.	Rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon kepala daerah.	61	4.52%	7
Jumlah		1360	100%	10

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut, Kompas.com memublikasikan 1360 paragraf berita dari 10 kategori isu pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020. Dari jumlah paragraf tersebut, kategori paling dominan adalah kategori dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik sebanyak 300 paragraf atau sekitar 22.05% dari total paragraf. Kategori pada peringkat kedua dengan frekuensi sebanyak 296 paragraf atau sekitar 21.76% dari total paragraf yaitu kategori kritikan terhadap dinasti politik.

Frekuensi kategori isu pemberitaan Kompas.com pada peringkat ketiga adalah kategori pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik. Frekuensi kategori tersebut muncul sebanyak 222 paragraf atau sekitar 16.32%. Dengan memublikasikan kategori tersebut secara dominan, Kompas.com mengajak pembaca untuk mengetahui jumlah dan daftar nama pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik dalam kontestasi Pilkada tahun 2020.

Kategori pada urutan keempat dengan 164 paragraf atau sekitar 12.05% ditempati oleh kategori kegiatan pasangan calon yang terafiliasi

dengan pejabat publik. Dengan adanya kategori ini menandakan Kompas.com ingin menunjukkan kegiatan pasangan calon tersebut selama Pilkada serentak tahun 2020 berlangsung. Kegiatan yang dilakukan di antaranya mencari dukungan dari partai politik, kampanye, dan debat publik.

Kategori tanggapan pasangan calon dan keluarga atas tudingan dinasti politik menempati posisi kelima dengan frekuensi sebanyak 159 paragraf atau 11.69% dari total populasi. Pada pemberitaan Kompas.com banyak ditampilkan tanggapan dari pasangan calon dan keluarga. Kompas.com memberi ruang bagi pasangan calon dan keluarga untuk menanggapi atas tudingan dinasti politik. Beberapa tanggapan di antaranya berupa bantahan atas tudingan tersebut dan menyatakan bahwa keluarga tidak ikut andil dalam pencalonan.

Kompas.com juga membahas kategori isu yang cukup penting yaitu kategori visi dan misi pasangan calon. Kategori ini menduduki peringkat keenam dengan frekuensi sebanyak 68 paragraf atau 5% dari total populasi. Pada kategori ini Kompas.com berperan aktif mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon.

Kategori rekapitulasi penghitungan suara masuk menduduki kategori peringkat ketujuh, yakni 61 paragraf atau 4.52% dari total populasi. Pada pemberitaan Kompas.com banyak ditampilkan hasil perolehan suara pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik. Kompas.com ingin pembaca mengetahui apakah pasangan calon tersebut unggul atau tidak unggul dalam Pilkada serentak 2020.

Peringkat kedelapan ditempati oleh kategori isu kebijakan aturan bagi kerabat pejabat yang maju dalam kontestasi Pilkada, dengan frekuensi sebanyak 58 paragraf atau 4.26%. Dengan memunculkan kategori tersebut Kompas.com mengajak pembaca untuk mengetahui peraturan terkait hal ini. Selain itu, kategori isu ini juga membahas usulan dari para pakar politik terkait peraturan tersebut.

Selanjutnya peringkat kesembilan adalah kategori penyebab adanya dinasti politik dengan frekuensi sebanyak 17 paragraf atau 1.25% dari total populasi, memang kategori ini tidak sebanyak frekuensi kategori di atas. Menurut pemberitaan isu dinasti politik pada Pilkada serentak 2020 di Kompas.com, salah satu penyebab munculnya dinasti politik adalah karena rekrutmen politik di dalam partai tidak berjalan baik.

Yang menarik, posisi terakhir adalah kategori yang sedikit muncul terkait dampak yang ditimbulkan dari dinasti politik, dengan frekuensi sebanyak 15 paragraf atau 1.1%. Kategori ini berisi pernyataan politikus yang menyebutkan beberapa masalah yang akan terjadi jika dinasti politik tetap dilanggengkan karena dapat menjadi hambatan mewujudkan demokrasi substansial. Melihat data yang ada Kompas.com tidak berfokus pada kategori ini.

Analisis Isi Berdasarkan Sikap Penulisan

Dalam kategori sikap penulisan media *online* Kompas.com dalam pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020 ini digunakan unit referensial yang terbagi menjadi tiga kategorisasi. Kategori tersebut adalah menguntungkan (*favourable*), berisi pernyataan yang secara eksplisit mendukung, menyetujui, mewajarkan adanya dinasti politik dalam Pilkada serentak tahun 2020, sedangkan tidak menguntungkan (*unfavourable*) sebaliknya. Sementara sikap netral adalah sikap yang ditunjukkan dalam pemberitaan yang secara eksplisit tidak terdapat keberpihakan terhadap pasangan calon dan dinasti politik.

Table 2. Persentase Kategori Sikap Penulisan Pemberitaan Dinasti Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kompas.com

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase	Ranking
1.	Favorable	457	33.62%	2
2.	Unfavorable	383	28.15%	3
3.	Netral	520	38.23%	1
Jumlah		1360	100%	3

Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil tabel 6, terlihat bahwa Kompas.com pada kategori sikap penulisan pemberitaan dinasti politik yang memiliki frekuensi tertinggi adalah kategori netral. Kategori netral mencapai 520 paragraf atau sekitar 38.23% dari total populasi. Hal ini menunjukkan Kompas.com memiliki sikap netral dengan tidak memasukan unsur menguntungkan maupun tidak terhadap pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020.

Kategori pada posisi kedua adalah kategori *favourable* atau menguntungkan dengan frekuensi 457 paragraf atau 33.62% dari total populasi. Menguntungkan dalam arti memberikan pemberitaan yang positif dan mendukung pasangan calon yang terafiliasi pejabat publik dalam Pilkada serentak tahun 2020.

Kategori yang memiliki jumlah terendah adalah *unfavourable*, yaitu 383 paragraf atau 28.15% dari total populasi. Kategori ini memiliki isi pemberitaan tentang tanggapan publik yang tidak menguntungkan atau tidak mendukung pasangan calon yang terafiliasi pejabat publik dalam Pilkada serentak 2020.

Analisis Isi Kategori Isu Berdasarkan Sikap Penulisan

Setelah menemukan kategori isu dan kategori sikap penulisan yang dominan, selanjutnya peneliti meneliti frekuensi sikap penulisan yang ada di setiap kategori isu pemberitaan. Metode analisis ini untuk mengetahui dari 10 kategori isu diberitakan secara *favourable*, *unfavourable*, atau netral.

Hasilnya menunjukkan bahwa kategori kebijakan aturan bagi kerabat pejabat dalam kontestasi pilkada

diberitakan lebih banyak secara *unfavourable* yaitu 39 paragraf. Untuk kategori *favourable* sebanyak 12 paragraf dan netral sebanyak tujuh paragraf. Kategori ini banyak diberitakan secara *unfavourable* karena banyaknya paragraf yang menyebutkan pasal terkait pelarangan pejabat menggunakan kewenangan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon, dan banyaknya paragraf yang berisi pernyataan usulan pakar untuk merevisi UU terkait Pilkada, partai politik dan pemerintahan daerah.

Kategori pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik disampaikan secara netral sebanyak 192 paragraf, secara *favourable* sebanyak 24 paragraf dan *unfavourable* sebanyak 6 paragraf. Kompas.com lebih banyak memunculkan bentuk berita netral melalui kategori pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik.

Terlihat bahwa Kompas.com melakukan usaha penyeimbangan informasi pada kategori pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik. Kategori isu ini dominan diberitakan secara netral dengan menunjukkan nama-nama pasangan calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik dan penyebutan jumlah pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik.

Kategori isu kritikan terhadap dinasti politik disampaikan secara *unfavourable* sebanyak 293 paragraf dan netral sebanyak 3 paragraf. Tidak ditemukan paragraf berbentuk *favourable* pada kategori isu ini.

Paragraf pada kategori penyebab adanya dinasti politik semuanya diberitakan secara *unfavourable*. Paragraf *unfavourable* tampak dari

pernyataan bahwa munculnya dinasti politik adalah akibat rekrutmen politik di dalam partai tidak berjalan baik, dan pernyataan bahwa dinasti politik didorong oleh keinginan pemilik modal atau jejaring para pemburu rente.

Sedangkan kategori isu dampak dinasti politik disampaikan secara *unfavourable* sebanyak 15 paragraf. Tidak ditemukan paragraf yang disampaikan secara *favourable* dan netral pada kategori isu ini. Terlihat bahwa seluruh paragraf Kompas.com mengenai kategori isu ini menunjukkan sikap *unfavourable* atau tidak mendukung dinasti politik pada Pilkada serentak 2020. Paragraf-paragraf dalam kategori ini dimuat Kompas.com untuk menyampaikan bila dinasti politik tetap dilanggengkan akan menghambat hadirnya sistem politik modern yang profesional dan berakibat rusaknya kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, kategori isu ini memiliki jumlah paragraf paling sedikit dibanding kategori isu lainnya.

Diskusi dan Interpretasi

Seperti telah disebutkan, kategori isu paling dominan adalah kategori dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik sebanyak 300 paragraf atau sekitar 22.05% dari total paragraf. Sedangkan kategori isu peringkat kedua dengan frekuensi sebanyak 296 paragraf atau sekitar 21.76% dari total paragraf adalah kategori kritikan terhadap dinasti politik.

Yang menarik dari temuan tersebut adalah kategori dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik dengan frekuensi 300 paragraf itu tidak terpaut jauh dengan kategori kritikan terhadap dinasti politik yang memiliki frekuensi 296 paragraf. Perbedaannya hanya 4

paragraf atau 0,74%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com terkait dua isu ini berimbang, yakni sama-sama mengakomodasi suara atau aspirasi dari dua kelompok masyarakat yang berseberangan, yaitu kelompok yang mendukung dinasti politik dan kelompok yang memprotesnya.

Sedangkan kategori sikap penulisan berita yang menjadi kategori dominan adalah kategori sikap penulisan netral. Hal ini menggambarkan bahwa Kompas.com tidak ingin menyajikan berita yang memiliki kecenderungan.

Namun, isu penyebab dan dampak dinasti politik mendapat porsi pemberitaan yang kecil, yakni kategori isu penyebab dinasti politik sebanyak 17 paragraf atau 1.25%, dan kategori isu dampak dinasti politik sebanyak 15 paragraf atau 1.1%. Semua paragraf dalam dua kategori isu ini menunjukkan sikap *unfavourable*, artinya sikap tidak mendukung dinasti politik pada Pilkada serentak 2020.

Mengapa dua kategori isu yang seluruh paragrafnya mencerminkan sikap tidak mendukung politik dinasti itu mendapat porsi pemberitaan yang kecil? Pada dua kategori isu pertama (kategori isu dukungan publik terhadap dinasti politik dan kategori isu kritikan publik terhadapnya), pemberitaan Kompas.com tampak bersifat berimbang, karena hampir samanya jumlah paragraf untuk dua isu ini, yakni 300 dan 296. Namun terhadap dua isu terakhir yang pada dasarnya mengkritik tajam praktik dinastik politik (kategori isu penyebab dan dampak dinasti politik), Kompas.com hanya menurunkan 17 dan 15 paragraf atau total 32 paragraf.

Hal ini barangkali dapat dijelaskan dengan dua perspektif. *Pertama*, secara akumulatif, jumlah

paragraf dalam kategori isu kritikan publik terhadap dinasti publik (296 paragraf) ditambah jumlah paragraf dalam kategori dua isu terakhir (32 paragraf) serta jumlah paragraf *unfavourable* dalam kategori isu peraturan terkait kerabat pejabat (39 paragraf) seluruhnya berjumlah 367 paragraf. Artinya dalam perspektif ini, jumlah paragraf dalam berita Kompas.com yang mengkritik dinasti politik lebih besar dibanding jumlah paragraf yang menyetujuinya.

Namun, dari perspektif *kedua*, minimnya paragraf untuk isu penyebab dan dampak dinasti politik barangkali tidak lepas dari kenyataan sulitnya independensi media dari kepentingan politik tertentu atau dari popularitas isu kontroversial tertentu di ranah publik.

Menurut satu perspektif, Kompas sejak berdiri hingga berakhirnya rezim Orde Baru identik dengan istilah “jurnalisme kepitng”, maksudnya adalah bahwa dalam pemberitaannya Kompas tidak secara langsung mengkritik pemerintah dan menjaga agar tulisan-tulisan yang dibuat tidak melampaui batas.¹⁵ Sejak saat itu Kompas hadir sebagai media moderat yang berpengaruh di Indonesia hingga hari ini.

E. Kesimpulan

Kompas.com memublikasikan 1360 paragraf berita dari 10 kategori isu pemberitaan dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2020. Dari jumlah paragraf tersebut, kategori paling dominan adalah kategori dukungan kepada pasangan calon yang terafiliasi dengan pejabat publik sebanyak 300

paragraf atau sekitar 22.05% dari total paragraf. Sedangkan peringkat kedua dengan frekuensi 296 paragraf atau sekitar 21.76% adalah isu kategori kritikan terhadap dinasti politik.

Imbangnya jumlah paragraf berita yang mengkritik maupun paragraph berita yang mendukung calon dinasti politik menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com bersifat berimbang, yakni sama-sama mengakomodasi dua suara atau aspirasi public yang berseberangan, yaitu kelompok yang mendukung dinasti politik dan kelompok yang memprotesnya. Hal ini terlihat juga dari kategori sikap penulisan berita, di mana kategori yang dominan adalah kategori sikap penulisan netral.

Namun, ada dua kategori isu yang mendapat porsi pemberitaan kecil di Kompas.com. Padahal dua isu ini bersifat mengkritik tajam praktik dinasti politik. Yakni kategori isu penyebab dan dampak dinasti politik yang mendapat porsi pemberitaan sebanyak 32 paragraf. Namun, secara akumulatif, jumlah paragraf dalam kategori isu kritikan publik terhadap dinasti publik (296 paragraf) ditambah jumlah paragraf dalam kategori dua isu terakhir (32 paragraf) serta jumlah paragraf *unfavourable* dalam kategori isu peraturan terkait kerabat pejabat (39 paragraf) seluruhnya berjumlah 367 paragraf. Artinya, jumlah paragraf dalam berita Kompas.com yang mengkritik dinasti politik tetap lebih besar dibanding jumlah paragraf yang menyetujuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: Kencana.
- Azwar, Syaifudin. 2011. *Sikap Manusia, Teori, dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Birowo, M. Antonius. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Bulaeng, Andi. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*. Yogyakarta: ANDI.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gay, Lorrie R., Geoffrey E. Mills and Peter Airasian. 2009. *Education Research, Competencies for Analysis and Application*. New Jersey: Pearson Education.
- Hikmat dan Purnama Kusumanngrat. 2009. *Jurnalistik: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Bestari.
- Iswara, Luwi. 2007. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas.
- Jumroni. 2006. *Metode-Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: UIN.
- Kountur, Rony. 2003. *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Krippendorff, Klaus. 1993. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi Terjemahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2016. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- McNair, Brian. 1999. *Politics Democracy and the Media, in An Introduction to Political Communication*.

- Second Edition*. London: Routledge.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rabi'ah, Rumidan. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu Di Indonsia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahayu. 2006. *Potret Profesionalisme dan Kualitas Pemberitaan Surat Kabar Indonesia*. Dalam Rahayu (ed). *Meningkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer: Dewan Pers dan Departemen Komunikasi dan Infomasi.
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Onine*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhaimi dan Rully Nasrullah. 2009. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Sumadiria, Harris. 2006. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, Hermin Indah. 2013. *Kebijakan Media Baru Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Weber, Robert Philip. 1990. *Basic Content Analysis, 2th ed*. California: Sage Publication.
- Jurnal:**
- Aminah, Siti. (2006). *Politik Media, Demokrasi dan Media Politik*. Universitas Airlangga .
- Arswendi, Riki. (2017). *Media, Pilkada Serentak dan Demokrasi*. Jurnal Transvornative, Vol.3, No.2.
- Haerudin, Wahyu Hamdani, dkk. (2020). *Media Lokal dalam Pross Demokratisasi: Agen Politik atau Saluran Komunikasi Politik?*, Komunida, Vol.10, No.2.
- Irianti, Een. (2020). *Representasi Wacana Politik Dinasti di Media Online Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Pencalonan Gibran, Boby dan Nur Azizah dalam Kontestasi Pilkada di Tempo.co*. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
- Jati, Wasisto Raharjo. (2013). *Politik Persuasif Media: Peran Media dalam Pemilu Presiden Indonesia 2001-2009*. LIPI.

- Khotimah, Nurul. (2019). *Tantangan Independensi Media dalam Pemilu: Kasus Kompas.com*. UIN Walisongo Semarang, Vol.4, No.2. 2020 diakses tanggal 18 Desember 2020
- Khudori, Nabilla Noor dan Pawito. (2014). *Netralitas Berita Luar Negeri (Studi Analisis Isi KUalitatif Pemberitaan CNN.Com Mengenai Krisis Krimea Periode Februari-April2014)*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Poti, Jamhur. (2011). *Demokratisasi Media Massa dlam Prinsip Kebebasan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol.1, No.1.
- Susanti, Martien Herna. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, Jurnal Vol.1, No.2.
- Syamsuadi, Amir. (2020). *Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. Universitas Abdurrab Riau.
- Widharyanto. (2016). *Fenomena Perspektif di Dalam Wacana Berita*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Farisa, Fitria Chusna. (2020, Februari 17). *Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/19261381/riset-nagara-institute-banten-terbesar-soal-terpapar-dinasti-politik> (diakses pada 15 Januari 2021)
- Maharani, Tsarina. (2020, Agustus 3). *69,1 Persen Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti jika Ada Kemampuan*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/10144661/691-persen-responden-mau-pilih-hasil-politik-dinasti-jika-ada-kemampuan?page=all> (diakses pada 15 Januari 2021)
- Nagara Institute. (2020, Oktober 12). *Pers Release: 124 Dinasti Politik Bertarung Dalam Pilkada Serentak 2020*. <http://nagarainstitute.com/wp-content/uploads/2020/10/PERS-RELEASE-DINASTI-POLITIK-NAGARA-INSTITUTE-12-OKTOBER-2020.pdf> (diakses pada 14 Januari 2021)
- Natalia, Desca Lidya. (2020, September 8). *Ketua KPU: 743 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2020*. <https://www.antaraneews.com/berita/1713510/ketua-kpu-743-bakal-pasangan-calon-kepala-daerah-daftar-pilkada-2020> (diakses tanggal 8 Januari 2021)
- Website:**
- Detikcom. (2019, Juni 23). *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*. <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-galar-pilkada-serentak->

- Nugroho, Kukuh Bhimo. (2016, Juni 16). *Politik Dinasti Ada di 61 Kepala Daerah*.
<https://tirto.id/politik-dinasti-ada-di61-kepala-daerah-bk1D>
(diakses pada 15 Januari 2021)
- Remotivi. (2015, Juni 25). *Jurnalisme Kepiting Kompas*.
<https://www.remotivi.or.id/kabar/76/jurnalisme-kepiting-kompas> diakses 7 Agustus 2021.
- Sari, Haryanti Puspa. (2019, Desember 17). *Sekjen Demokrat: Anak Presiden atau Bukan, Punya Kesempatan yang Sama*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/22092801/sekjen-demokrat-anak-presiden-atau-bukan-punya-kesempatan-yang-sama>
(diakses pada 18 Februari 2021)
- Sari, Haryanti Puspa. (2020, Oktober 21). *Setahun Jokowi-Maruf, PKS Kritik Tumbuhnya Politik Dinasti dan Kinerja Menteri*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/15205171/setahun-jokowi-maruf-pks-kritik-tumbuhnya-politik-dinasti-dan-kinerja?page=all#page2>
(diakses pada 18 Februari 2021)
- Suwiknyo, Edi. (2020, Desember 4). *Pilkada 2020 Dibidik Oligarki, Demokrasi Mati Suri*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326377/pilkada-2020-dibidik-oligarki-demokrasi-mati-suri> (diakses pada 18 Februari 2021)
- Ulya, Fika Nurul. (2019, Agustus 1). *Kompas.com Kembali Jadi Pemenang Kategori Media Online Terpercaya*.
<https://money.kompas.com/read/2019/08/01/124215826/kompascom-kembali-jadi-pemenang-kategori-media-online-tepercaya?page=all>
(diakses pada 18 Februari 2021)